



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 2026 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 2026 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :



Edit dengan WPS Office

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025;
 - c. Neraca per 31 Desember 2025;
 - d. Laporan Operasional per 31 Desember 2025;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2025.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4.556.786.610.641,35	
b. Belanja	Rp.	4.298.309.595.676,84	—
Surplus / defisit	Rp.	258.477.014.964,51	
c. Pembiayaan	:		
Penerimaan	Rp.	262.828.328.505,37	
Pengeluaran	Rp.	159.291.542.148,00	—
Pembiayaan Netto	Rp.	103.536.786.357,37	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(531.357.852.650,65) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah PerubahanRp. 5.088.144.463.292,00
 - b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)Rp. 4.556.786.610.641,35
 -
 -
 -
 - Rp. (531.357.852.650,65)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(889.184.507.836,16) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah PerubahanRp. 5.187.494.103.513,00
 - b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)Rp. 4.298.309.595.676,84
 -
 -
 -
 - Rp. (889.184.507.836,16)



(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp357.826.655.186,51 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Surplus/defisit setelah Perubahan		
		Rp.	(99.349.640.221,00)
b.	Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	258.477.014.964,51
		Rp.	357.826.655.186,51
(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp878.680,37 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Penerimaan		
	Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	262.829.207.185,00
b.	Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	262.828.328.505,37
		Rp.	878.680,37
(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(4.188.024.816,00) dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Pengeluaran		
	Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	163.479.566.964,00
b.	Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	159.291.542.148,00
		Rp.	(4.188.024.816,00)
(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp4.187.146.136,37 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Pembiayaan Netto		
	setelah perubahan	Rp.	99.349.640.221,00
b.	Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	103.536.786.357,37
		Rp.	4.187.146.136,37

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	262.829.210.192.37
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	262.828.328.505.37
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	362.013.801321,88
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	881.687,00
e.	Lain – lain	Rp.	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	362.013.801.321,88

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	12.163.503.932.576,18
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	732.707.219.649,99
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	11.430.796.712.926,19

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan – LO	Rp.	4.757.909.927.697,57
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp.	1.444.065.310.719,15
2.	Pendapatan Transfer – LO	Rp.	3,053.465.719.247,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Rp.	260.378.897.731,42
b.	Beban – LO	Rp.	4.778.964.962.062,46
1.	Beban Pegawai	Rp.	1.990.936.214.248,20
2.	Beban Persediaan	Rp.	501.047.958.564,57
3.	Beban Jasa	Rp.	751.120.905.161,48
4.	Beban Pemeliharaan	Rp.	25.037.641.083,56
5.	Beban Perjalanan Dinas	Rp.	133.507.654.995,00
6.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	Rp.	25.704.287.650,00
7.	Beban Bunga	Rp.	36.454.659.018,00
8.	Beban Hibah	Rp.	185.365.911.861,00
9.	Beban Bantuan Sosial	Rp.	10.332.950.000,00
10.	Beban Penyisihan Piutang	Rp.	3.971.888.433,05
11.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	606.083.061.907,60
12.	Beban Transfer	Rp.	501.771.829.140,00
13.	Beban Bantuan Keuangan	Rp.	7.630.000.000,00
c.	Defisit Penjualan/pertukaran Pelepasan Aset Non Lancar -LO	Rp.	(434.151.848,11)
d.	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	Rp.	(1.658.870.904,00)
e.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(23.831.998.333,00)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2025	Rp.	263.265.280.880,37
b.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	612.804.755.074,44
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(354.327.740.109,93)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(159.291.542.148,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	2.800.015.230,08
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2025	Rp.	365.249.887.239,96

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	11.349.628.703.515,30
b.	RK PPKD	Rp.	0,00
c.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(23.831.998.333,00)
d.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	Rp.	105.000.007.743,89



- Dampak Perubahan Atas Kas	Rp.	(881.687,00)
- Dampak Perubahan Atas Piutang	Rp.	32.572.932.943,38
- Dampak Perubahan Atas Penyisihan	Rp.	843.451.729,90
- Dampak Perubahan Nilai Persediaan	Rp.	1.330.934.629,00
- Dampak Perubahan Atas Investasi	Rp.	(2.941.362.155,48)
- Dampak Perubahan Aset Tetap	Rp.	(145.936.321.275,02)
- Dampak Perubahan Atas Penyusutan	Rp.	228.108.213.890,22
- Dampak Perubahan Atas Aset Lain	Rp.	(1.117.720.000,00)
- Dampak Perubahan Atas Utang	Rp.	(7.859.240.331,11)
e. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	11.430.796.712.926,19

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;

- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 - v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah,
- dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2026



E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
WAKIL GUBERNUR	
PLH. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	



LAMPIRAN I.I RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	PENDAPATAN	5.088.144.463.292,00	4.556.786.610.641,35	(531.357.852.650,65)	89,56
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	159.628.385.000,00	149.258.197.718,65	(10.370.187.281,35)	93,50
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.000.000.000,00	1.081.558.000,00	81.558.000,00	108,16
1 01 0 00 0 00 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	1.081.558.000,00	81.558.000,00	108,16
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	152.781.985.000,00	144.878.955.431,65	(7.903.029.568,35)	94,83
1 02 0 00 0 00 01	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang			-	-
1 02 0 00 0 00 03	Dinas Kesehatan	152.781.985.000,00	144.878.955.431,65	(7.903.029.568,35)	94,83
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.700.000.000,00	3.140.375.287,00	(2.559.624.713,00)	55,09
1 03 1 04 2 10 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.700.000.000,00	3.140.375.287,00	(2.559.624.713,00)	55,09
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	146.400.000,00	157.309.000,00	10.909.000,00	107,45
1 06 0 00 0 00 01	Dinas Sosial	146.400.000,00	157.309.000,00	10.909.000,00	107,45
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.607.350.000,00	4.355.030.126,00	(6.252.319.874,00)	41,06
2 07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	201.639.000,00	130.089.000,00	(71.550.000,00)	64,52

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 07 0 0 0 00 01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	201.639.000,00	130.089.000,00	(71.550.000,00)	64,52
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000,00	191.400.000,00	11.400.000,00	106,33
2 08 0 0 0 00 02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	180.000.000,00	191.400.000,00	11.400.000,00	106,33
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	5.000.000.000,00	1.763.266.661,00	(3.236.733.339,00)	35,27
2 11 3 28 0 00 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.000.000.000,00	1.763.266.661,00	(3.236.733.339,00)	35,27
2 12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
2 12 0 0 0 00 01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			-	-
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	200.000.000,00	61.008.000,00	(138.992.000,00)	30,50
2 13 2 12 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00	61.008.000,00	(138.992.000,00)	30,50
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	4.000.000.000,00	1.353.215.465,00	(2.646.784.535,00)	33,83
2 15 0 00 0 00 01	Dinas Perhubungan	4.000.000.000,00	1.353.215.465,00	(2.646.784.535,00)	33,83
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	39.750.000,00	(30.250.000,00)	56,79
2 16 2 20 2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	39.750.000,00	(30.250.000,00)	56,79
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	125.711.000,00	82.139.500,00	(43.571.500,00)	65,34
2 17 0 00 0 00 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125.711.000,00	82.139.500,00	(43.571.500,00)	65,34
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-
2 18 0 00 0 00 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	701.116.000,00	(98.884.000,00)	87,64
2 19 0 00 0 00 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	701.116.000,00	(98.884.000,00)	87,64
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	30.000.000,00	33.045.500,00	3.045.500,00	110,15
2 23 2 24 0 00 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	33.045.500,00	3.045.500,00	110,15
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.622.116.194,00	18.190.593.881,00	(8.431.522.313,00)	68,33

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
							Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
							Rp	Rp	(Rp)	%
1	2						3	4	5 = (4-3)	6
3 25							10.000.000.000,00	9.756.965.806,00	(243.034.194,00)	97,57
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Kelautan dan Perikanan						10.000.000.000,00	9.756.965.806,00	(243.034.194,00)	97,57
3 26							1.782.951.194,00	293.604.800,00	(1.489.346.394,00)	16,47
3 26 0 00 0 00 01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						1.782.951.194,00	293.604.800,00	(1.489.346.394,00)	16,47
3 27							14.550.000.000,00	7.898.534.075,00	(6.651.465.925,00)	54,29
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						5.500.000.000,00	1.747.679.075,00	(3.752.320.925,00)	31,78
3 25 0 00 0 00 02	Dinas Peternakan						9.050.000.000,00	6.150.855.000,00	(2.899.145.000,00)	67,97
3 29							120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	-
3 29 0 00 0 00 01	Dinas Energi Sumber Daya Mineral						120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	0,00
3 31							169.165.000,00	241.489.200,00	72.324.200,00	142,75
3 31 3 30 2 17 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						169.165.000,00	241.489.200,00	72.324.200,00	142,75
4							391.577.781,00	523.427.581,00	131.849.800,00	133,67
4 01							391.577.781,00	523.427.581,00	131.849.800,00	133,67
4 01 0 00 0 00 01	Sekretariat Daerah						391.577.781,00	523.427.581,00	131.849.800,00	133,67
4 02							-	-	-	-
4 02 0 00 0 00 01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						-	-	-	-
5							4.890.858.989.317,00	4.384.423.241.334,70	(506.435.747.982,30)	89,65
5 01							-	-	-	-
5 01 0 0 0 00 02	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						-	-	-	-
5 01 5 05 0 00 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						-	-	-	-
5 02							4.875.677.339.317,00	4.373.719.141.334,70	(501.958.197.982,30)	89,70
5 02 0 00 0 00 01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah						1.443.070.973.592,00	1.051.250.399.088,91	(391.820.574.503,09)	72,85
5 02 0 00 0 00 02	Badan Keuangan Daerah						3.432.606.365.725,00	3.322.468.742.245,79	(110.137.623.479,21)	96,79
5 03							-	-	-	-
5 03 0 00 0 00 01	Badan Kepegawaian Daerah						-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
5 04	Pendidikan dan Pelatihan	14.981.650.000,00	10.474.700.000,00	(4.506.950.000,00)	69,92
5 04 0 00 0 00 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.981.650.000,00	10.474.700.000,00	(4.506.950.000,00)	69,92
5 06	Pengelolaan Perbatasan	-	-	-	-
5 06 0 00 0 00 01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
5 07	Pengelolaan Penghubung	200.000.000,00	229.400.000,00	29.400.000,00	114,70
5 07 0 00 0 00 01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	200.000.000,00	229.400.000,00	29.400.000,00	114,70
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
6 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
6 01 0 00 0 00 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	36.045.000,00	36.120.000,00	75.000,00	100,21
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	36.045.000,00	36.120.000,00	75.000,00	100,21
8 01 0 00 0 00 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.045.000,00	36.120.000,00	75.000,00	100,21
	BELANJA	5.187.494.103.513,00	4.298.309.595.676,84	(889.184.507.836,16)	82,86
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.350.215.223.377,00	2.769.794.681.220,55	(580.420.542.156,45)	82,68
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2.549.106.034.264,00	2.075.969.968.034,00	(473.136.066.230,00)	81,44
1 01 0 00 0 00 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.549.106.034.264,00	2.075.969.968.034,00	(473.136.066.230,00)	81,44
	BELANJA OPERASI	2.367.341.043.960,00	1.903.085.312.127,00	(464.255.731.833,00)	80,39
	Belanja Pegawai	1.751.014.942.053,00	1.373.329.929.776,00	(377.685.012.277,00)	78,43
	Belanja Barang dan Jasa	441.875.331.367,00	356.826.179.125,00	(85.049.152.242,00)	80,75
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi			-	-
	Belanja Hibah	174.450.770.540,00	172.929.203.226,00	(1.521.567.314,00)	99,13
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	181.764.990.304,00	172.884.655.907,00	(8.880.334.397,00)	95,11
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
							Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
							Rp	Rp	(Rp)	%
1	2						3	4	5 = (4-3)	6
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						524.346.754.381,00	453.755.945.861,77	(70.590.808.519,23)	86,54
1 02 0 00 0 00 01	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang						-	-	-	-
	BELANJA OPERASI						-	-	-	-
	Belanja Pegawai						-	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa						-	-	-	-
	Belanja Bunga						-	-	-	-
	Belanja Subsidi						-	-	-	-
	Belanja Hibah						-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial						-	-	-	-
	BELANJA MODAL						-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA						-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER						-	-	-	-
1 02 0 00 0 00 03	Dinas Kesehatan						524.346.754.381,00	453.755.945.861,77	(70.590.808.519,23)	86,54
	BELANJA OPERASI						478.074.068.854,00	419.112.621.928,31	(58.961.446.925,69)	87,67
	Belanja Pegawai						153.737.030.747,00	134.197.755.000,20	(19.539.275.746,80)	87,29
	Belanja Barang dan Jasa						324.037.038.107,00	284.614.866.928,11	(39.422.171.178,89)	87,83
	Belanja Bunga						-	-	-	-
	Belanja Subsidi						-	-	-	-
	Belanja Hibah						300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial						-	-	-	-
	BELANJA MODAL						46.272.685.527,00	34.643.323.933,46	(11.629.361.593,54)	74,87
	BELANJA TIDAK TERDUGA						-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER						-	-	-	-
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						193.368.808.591,00	164.211.053.952,00	(29.157.754.639,00)	84,92
1 03 1 04 2 10 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						193.368.808.591,00	164.211.053.952,00	(29.157.754.639,00)	84,92
	BELANJA OPERASI						85.356.028.827,00	68.404.189.674,00	(16.951.839.153,00)	80,14
	Belanja Pegawai						39.331.534.676,00	30.534.568.456,00	(8.796.966.220,00)	77,63
	Belanja Barang dan Jasa						46.024.494.151,00	37.869.621.218,00	(8.154.872.933,00)	82,28
	Belanja Bunga						-	-	-	-

R

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	108.012.779.764,00	95.806.864.278,00	(12.205.915.486,00)	88,70
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	24.275.881.775,00	21.974.919.983,00	(2.300.961.792,00)	90,52
1 05 0 00 0 00 01	Satuan Polisi Pamong Praja	12.265.095.982,00	11.095.747.621,00	(1.169.348.361,00)	90,47
	BELANJA OPERASI	12.221.095.982,00	11.051.836.021,00	(1.169.259.961,00)	90,43
	Belanja Pegawai	10.406.418.778,00	9.483.637.615,00	(922.781.163,00)	91,13
	Belanja Barang dan Jasa	1.814.677.204,00	1.568.198.406,00	(246.478.798,00)	86,42
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	44.000.000,00	43.911.600,00	(88.400,00)	99,80
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.010.785.793,00	10.879.172.362,00	(1.131.613.431,00)	90,58
	BELANJA OPERASI	11.994.398.863,00	10.862.785.432,00	(1.131.613.431,00)	90,57
	Belanja Pegawai	4.716.817.402,00	4.187.073.733,00	(529.743.669,00)	88,77
	Belanja Barang dan Jasa	7.277.581.461,00	6.675.711.699,00	(601.869.762,00)	91,73
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	16.386.930,00	16.386.930,00	-	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	59.117.744.366,00	53.882.793.389,78	(5.234.950.976,22)	91,14
1 06 0 00 0 00 01	Dinas Sosial	59.117.744.366,00	53.882.793.389,78	(5.234.950.976,22)	91,14
	BELANJA OPERASI	45.175.836.140,00	40.676.518.280,00	(4.499.317.860,00)	90,04
	Belanja Pegawai	17.773.424.322,00	15.900.450.548,00	(1.872.973.774,00)	89,46
	Belanja Barang dan Jasa	26.452.411.818,00	23.826.067.732,00	(2.626.344.086,00)	90,07
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi			-	-
	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00
	BELANJA MODAL	13.941.908.226,00	13.206.275.109,78	(735.633.116,22)	94,72
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	303.125.651.137,00	262.303.219.112,00	(40.822.432.025,00)	86,53
2 07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	30.628.780.358,00	28.025.574.693,00	(2.603.205.665,00)	91,50
2 07 0 0 0 00 01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	30.628.780.358,00	28.025.574.693,00	(2.603.205.665,00)	91,50
	BELANJA OPERASI	30.583.064.458,00	27.979.864.693,00	(2.603.199.765,00)	91,49
	Belanja Pegawai	14.365.228.870,00	12.402.932.043,00	(1.962.296.827,00)	86,34
	Belanja Barang dan Jasa	16.217.835.588,00	15.576.932.650,00	(640.902.938,00)	96,05
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	45.715.900,00	45.710.000,00	(5.900,00)	99,99
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.198.052.094,00	15.518.736.063,00	(5.679.316.031,00)	73,21

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 08 0 0 0 00 02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.198.052.094,00	15.518.736.063,00	(5.679.316.031,00)	73,21
	BELANJA OPERASI	11.614.528.104,00	8.797.263.202,00	(2.817.264.902,00)	75,74
	Belanja Pegawai	6.208.875.737,00	5.231.882.881,00	(976.992.856,00)	84,26
	Belanja Barang dan Jasa	5.380.652.367,00	3.540.380.321,00	(1.840.272.046,00)	65,80
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
	BELANJA MODAL	9.583.523.990,00	6.721.472.861,00	(2.862.051.129,00)	70,14
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	93.560.648.295,00	80.496.723.227,00	(13.063.925.068,00)	86,04
2 11 3 28 0 00 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	93.560.648.295,00	80.496.723.227,00	(13.063.925.068,00)	86,04
	BELANJA OPERASI	93.415.313.995,00	80.371.169.229,00	(13.044.144.766,00)	86,04
	Belanja Pegawai	77.549.316.687,00	66.022.244.884,00	(11.527.071.803,00)	85,14
	Belanja Barang dan Jasa	15.865.997.308,00	14.348.924.345,00	(1.517.072.963,00)	90,44
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	145.334.300,00	125.553.998,00	(19.780.302,00)	86,39
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.527.163.382,00	4.652.224.587,00	(874.938.795,00)	84,17
2 12 0 0 0 00 01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.527.163.382,00	4.652.224.587,00	(874.938.795,00)	84,17
	BELANJA OPERASI	4.188.048.704,00	3.342.664.486,00	(845.384.218,00)	79,81
	Belanja Pegawai	1.953.817.459,00	1.501.757.099,00	(452.060.360,00)	76,86
	Belanja Barang dan Jasa	2.234.231.245,00	1.840.907.387,00	(393.323.858,00)	82,40

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	1.339.114.678,00	1.309.560.101,00	(29.554.577,00)	97,79
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	23.886.022.258,00	19.857.597.587,00	(4.028.424.671,00)	83,13
2 13 2 12 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.886.022.258,00	19.857.597.587,00	(4.028.424.671,00)	83,13
	BELANJA OPERASI	23.220.887.004,00	19.401.820.749,00	(3.819.066.255,00)	83,55
	Belanja Pegawai	6.327.011.118,00	5.890.313.657,00	(436.697.461,00)	93,10
	Belanja Barang dan Jasa	16.893.875.886,00	13.511.507.092,00	(3.382.368.794,00)	79,98
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	665.135.254,00	455.776.838,00	(209.358.416,00)	68,52
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	32.562.745.961,00	29.830.422.028,00	(2.732.323.933,00)	91,61
2 15 0 00 0 00 01	Dinas Perhubungan	32.562.745.961,00	29.830.422.028,00	(2.732.323.933,00)	91,61
	BELANJA OPERASI	20.808.849.540,00	18.400.107.965,00	(2.408.741.575,00)	88,42
	Belanja Pegawai	14.851.087.825,00	12.831.336.373,00	(2.019.751.452,00)	86,40
	Belanja Barang dan Jasa	5.957.761.715,00	5.568.771.592,00	(388.990.123,00)	93,47
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	11.753.896.421,00	11.430.314.063,00	(323.582.358,00)	97,25

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	21.849.862.757,00	19.094.478.797,00	(2.755.383.960,00)	87,39
2 16 2 20 2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.849.862.757,00	19.094.478.797,00	(2.755.383.960,00)	87,39
	BELANJA OPERASI	20.518.698.076,00	18.504.011.223,00	(2.014.686.853,00)	90,18
	Belanja Pegawai	6.481.626.946,00	6.044.365.961,00	(437.260.985,00)	93,25
	Belanja Barang dan Jasa	13.037.071.130,00	11.459.645.262,00	(1.577.425.868,00)	87,90
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi			-	-
	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	1.331.164.681,00	590.467.574,00	(740.697.107,00)	44,36
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	11.898.195.031,00	9.670.378.840,00	(2.227.816.191,00)	81,28
2 17 0 00 0 00 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.898.195.031,00	9.670.378.840,00	(2.227.816.191,00)	81,28
	BELANJA OPERASI	11.635.755.591,00	9.492.395.840,00	(2.143.359.751,00)	81,58
	Belanja Pegawai	5.758.286.347,00	4.862.103.777,00	(896.182.570,00)	84,44
	Belanja Barang dan Jasa	5.877.469.244,00	4.630.292.063,00	(1.247.177.181,00)	78,78
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi		-	-	-
	Belanja Hibah			-	-
	Belanja Bantuan Sosial			-	-
	BELANJA MODAL	262.439.440,00	177.983.000,00	(84.456.440,00)	67,82
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	7.804.443.165,00	7.028.308.563,00	(776.134.602,00)	90,06
2 18 0 00 0 00 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.804.443.165,00	7.028.308.563,00	(776.134.602,00)	90,06

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA OPERASI	7.662.001.152,00	6.888.747.298,00	(773.253.854,00)	89,91
	Belanja Pegawai	5.854.323.385,00	5.479.208.184,00	(375.115.201,00)	93,59
	Belanja Barang dan Jasa	1.807.677.767,00	1.409.539.114,00	(398.138.653,00)	77,98
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	142.442.013,00	139.561.265,00	(2.880.748,00)	97,98
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	41.268.887.572,00	36.808.409.306,00	(4.460.478.266,00)	89,19
2 19 0 00 0 00 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	41.268.887.572,00	36.808.409.306,00	(4.460.478.266,00)	89,19
	BELANJA OPERASI	41.128.965.572,00	36.773.499.306,00	(4.355.466.266,00)	89,41
	Belanja Pegawai	9.291.239.452,00	8.170.149.873,00	(1.121.089.579,00)	87,93
	Belanja Barang dan Jasa	25.307.726.120,00	23.486.349.433,00	(1.821.376.687,00)	92,80
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	3.550.000.000,00	3.075.000.000,00	(475.000.000,00)	86,62
	Belanja Bantuan Sosial	2.980.000.000,00	2.042.000.000,00	(938.000.000,00)	68,52
	BELANJA MODAL	139.922.000,00	34.910.000,00	(105.012.000,00)	24,95
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	12.940.850.264,00	11.320.365.421,00	(1.620.484.843,00)	87,48
2 23 2 24 0 00 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.940.850.264,00	11.320.365.421,00	(1.620.484.843,00)	87,48
	BELANJA OPERASI	11.978.965.940,00	10.377.021.695,00	(1.601.944.245,00)	86,63
	Belanja Pegawai	7.803.239.612,00	6.899.936.992,00	(903.302.620,00)	88,42
	Belanja Barang dan Jasa	4.175.726.328,00	3.477.084.703,00	(698.641.625,00)	83,27
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	961.884.324,00	943.343.726,00	(18.540.598,00)	98,07
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	203.750.653.750,00	162.805.520.899,29	(40.945.132.850,71)	79,90
3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	22.170.815.487,00	18.913.798.556,00	(3.257.016.931,00)	85,31
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.170.815.487,00	18.913.798.556,00	(3.257.016.931,00)	85,31
	BELANJA OPERASI	22.151.188.587,00	18.895.534.056,00	(3.255.654.531,00)	85,30
	Belanja Pegawai	15.305.826.426,00	13.251.104.832,00	(2.054.721.594,00)	86,58
	Belanja Barang dan Jasa	6.845.362.161,00	5.644.429.224,00	(1.200.932.937,00)	82,46
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	19.626.900,00	18.264.500,00	(1.362.400,00)	93,06
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	21.242.722.686,00	16.673.925.730,00	(4.568.796.956,00)	78,49
3 26 0 00 0 00 01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.242.722.686,00	16.673.925.730,00	(4.568.796.956,00)	78,49
	BELANJA OPERASI	20.354.132.666,00	16.345.267.257,00	(4.008.865.409,00)	80,30
	Belanja Pegawai	8.397.140.846,00	7.411.887.884,00	(985.252.962,00)	88,27
	Belanja Barang dan Jasa	11.956.991.820,00	8.933.379.373,00	(3.023.612.447,00)	74,71
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	888.590.020,00	328.658.473,00	(559.931.547,00)	36,99
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	112.230.910.767,00	93.543.479.523,60	(18.687.431.243,40)	83,35
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.870.873.275,00	63.789.496.653,00	(12.081.376.622,00)	84,08
	BELANJA OPERASI	75.158.355.429,00	63.157.625.068,00	(12.000.730.361,00)	84,03
	Belanja Pegawai	47.580.832.391,00	37.416.239.154,00	(10.164.593.237,00)	78,64
	Belanja Barang dan Jasa	27.577.523.038,00	25.741.385.914,00	(1.836.137.124,00)	93,34
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	712.517.846,00	631.871.585,00	(80.646.261,00)	88,68
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 25 0 00 0 00 02	Dinas Peternakan	36.360.037.492,00	29.753.982.870,60	(6.606.054.621,40)	81,83
	BELANJA OPERASI	35.133.866.764,00	28.709.000.820,60	(6.424.865.943,40)	81,71
	Belanja Pegawai	23.512.155.416,00	18.100.165.034,00	(5.411.990.382,00)	76,98
	Belanja Barang dan Jasa	11.621.711.348,00	10.608.835.786,60	(1.012.875.561,40)	91,28
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	1.226.170.728,00	1.044.982.050,00	(181.188.678,00)	85,22
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	15.169.719.195,00	13.933.584.642,00	(1.236.134.553,00)	91,85
3 29 0 00 0 00 01	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	15.169.719.195,00	13.933.584.642,00	(1.236.134.553,00)	91,85
	BELANJA OPERASI	15.058.220.595,00	13.837.495.742,00	(1.220.724.853,00)	91,89
	Belanja Pegawai	10.218.826.635,00	9.286.394.517,00	(932.432.118,00)	90,88

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Barang dan Jasa	4.839.393.960,00	4.551.101.225,00	(288.292.735,00)	94,04
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	111.498.600,00	96.088.900,00	(15.409.700,00)	86,18
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	32.936.485.615,00	19.740.732.447,69	(13.195.753.167,31)	59,94
3 31 3 30 2 17 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.936.485.615,00	19.740.732.447,69	(13.195.753.167,31)	59,94
	BELANJA OPERASI	27.281.445.295,00	17.234.240.655,00	(10.047.204.640,00)	63,17
	Belanja Pegawai	8.661.377.782,00	7.313.189.407,00	(1.348.188.375,00)	84,43
	Belanja Barang dan Jasa	17.940.067.513,00	9.241.051.248,00	(8.699.016.265,00)	51,51
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	680.000.000,00	680.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	5.655.040.320,00	2.506.491.792,69	(3.148.548.527,31)	44,32
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	298.102.746.956,00	269.905.808.601,00	(28.196.938.355,00)	90,54
4 01	Sekretariat Daerah	125.236.391.946,00	104.269.638.119,00	(20.966.753.827,00)	83,26
4 01 0 00 0 00 01	Sekretariat Daerah	125.236.391.946,00	104.269.638.119,00	(20.966.753.827,00)	83,26
	BELANJA OPERASI	120.873.570.393,00	102.194.988.492,00	(18.678.581.901,00)	84,55
	Belanja Pegawai	47.049.307.510,00	37.731.654.914,00	(9.317.652.596,00)	80,20
	Belanja Barang dan Jasa	62.149.778.883,00	55.222.383.578,00	(6.927.395.305,00)	88,85
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	1.625.000.000,00	1.575.000.000,00	(50.000.000,00)	96,92

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Bantuan Sosial	10.049.484.000,00	7.665.950.000,00	(2.383.534.000,00)	76,28
	BELANJA MODAL	4.362.821.553,00	2.074.649.627,00	(2.288.171.926,00)	47,55
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4 02	Sekretariat DPRD	172.866.355.010,00	165.636.170.482,00	(7.230.184.528,00)	95,82
4 02 0 00 0 00 01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	172.866.355.010,00	165.636.170.482,00	(7.230.184.528,00)	95,82
	BELANJA OPERASI	171.402.147.930,00	164.783.258.642,00	(6.618.889.288,00)	96,14
	Belanja Pegawai	65.707.288.780,00	63.707.308.701,00	(1.999.980.079,00)	96,96
	Belanja Barang dan Jasa	105.694.859.150,00	101.075.949.941,00	(4.618.909.209,00)	95,63
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	1.464.207.080,00	852.911.840,00	(611.295.240,00)	58,25
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	995.711.421.451,00	799.170.910.769,00	(196.540.510.682,00)	80,26
5 01	Perencanaan	23.192.418.127,00	19.645.373.073,00	(3.547.045.054,00)	84,71
5 01 0 0 0 00 02	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	23.192.418.127,00	19.645.373.073,00	(3.547.045.054,00)	84,71
	BELANJA OPERASI	22.957.209.027,00	19.411.739.073,00	(3.545.469.954,00)	84,56
	Belanja Pegawai	12.582.515.860,00	11.128.728.766,00	(1.453.787.094,00)	88,45
	Belanja Barang dan Jasa	10.374.693.167,00	8.283.010.307,00	(2.091.682.860,00)	79,84
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	235.209.100,00	233.634.000,00	(1.575.100,00)	99,33
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
5 02	Keuangan	913.777.665.531,00	728.747.532.980,00	(185.030.132.551,00)	79,75
5 02 0 00 0 00 01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	109.977.808.054,00	81.250.684.948,00	(28.727.123.106,00)	73,88
	BELANJA OPERASI	102.484.227.054,00	75.097.972.418,00	(27.386.254.636,00)	73,28
	Belanja Pegawai	60.304.524.783,00	39.924.536.624,00	(20.379.988.159,00)	66,20
	Belanja Barang dan Jasa	42.179.702.271,00	35.173.435.794,00	(7.006.266.477,00)	83,39
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	7.493.581.000,00	6.152.712.530,00	(1.340.868.470,00)	82,11
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 02 0 00 0 00 02	Badan Keuangan Daerah	803.799.857.477,00	647.496.848.032,00	(156.303.009.445,00)	80,55
	BELANJA OPERASI	87.367.639.090,00	76.331.042.316,00	(11.036.596.774,00)	87,37
	Belanja Pegawai	10.919.092.000,00	7.540.016.741,00	(3.379.075.259,00)	69,05
	Belanja Barang dan Jasa	29.241.623.606,00	22.320.877.840,00	(6.920.745.766,00)	76,33
	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	(736.775.749,00)	98,44
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	1.054.395.070,00	1.031.151.138,00	(23.243.932,00)	97,80
	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.451.539.191,00	728.941.216,00	(22.722.597.975,00)	3,11
	BELANJA TRANSFER	691.926.284.126,00	569.405.713.362,00	(122.520.570.764,00)	82,29
5 03	Kepegawaian	14.484.392.894,00	12.608.373.227,00	(1.876.019.667,00)	87,05
5 03 0 00 0 00 01	Badan Kepegawaian Daerah	14.484.392.894,00	12.608.373.227,00	(1.876.019.667,00)	87,05
	BELANJA OPERASI	14.362.344.484,00	12.517.487.722,00	(1.844.856.762,00)	87,15
	Belanja Pegawai	8.482.990.184,00	7.561.381.785,00	(921.608.399,00)	89,14
	Belanja Barang dan Jasa	5.879.354.300,00	4.956.105.937,00	(923.248.363,00)	84,30
	Belanja Bunga	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	122.048.410,00	90.885.505,00	(31.162.905,00)	74,47
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 04	Pendidikan dan Pelatihan	26.382.408.858,00	22.241.609.037,00	(4.140.799.821,00)	84,30
5 04 0 00 0 00 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.382.408.858,00	22.241.609.037,00	(4.140.799.821,00)	84,30
	BELANJA OPERASI	25.925.926.508,00	21.908.220.735,00	(4.017.705.773,00)	84,50
	Belanja Pegawai	9.630.953.558,00	8.580.279.338,00	(1.050.674.220,00)	89,09
	Belanja Barang dan Jasa	16.294.972.950,00	13.327.941.397,00	(2.967.031.553,00)	81,79
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	456.482.350,00	333.388.302,00	(123.094.048,00)	73,03
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 06	Pengelolaan Perbatasan	5.867.723.763,00	5.190.855.316,00	(676.868.447,00)	88,46
5 06 0 00 0 00 01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.867.723.763,00	5.190.855.316,00	(676.868.447,00)	88,46
	BELANJA OPERASI	5.867.723.763,00	5.190.855.316,00	(676.868.447,00)	88,46
	Belanja Pegawai	4.379.780.703,00	3.831.414.756,00	(548.365.947,00)	87,48
	Belanja Barang dan Jasa	1.487.943.060,00	1.359.440.560,00	(128.502.500,00)	91,36
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 07	Pengelolaan Penghubung	12.006.812.278,00	10.737.167.136,00	(1.269.645.142,00)	89,43
5 07 0 00 0 00 01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.006.812.278,00	10.737.167.136,00	(1.269.645.142,00)	89,43
	BELANJA OPERASI	11.667.554.778,00	10.495.610.096,00	(1.171.944.682,00)	89,96
	Belanja Pegawai	3.048.341.828,00	2.806.477.493,00	(241.864.335,00)	92,07
	Belanja Barang dan Jasa	8.619.212.950,00	7.689.132.603,00	(930.080.347,00)	89,21
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	339.257.500,00	241.557.040,00	(97.700.460,00)	71,20
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.065.064.672,00	19.169.599.753,00	(895.464.919,00)	95,54
6 01	Inspektorat Daerah	20.065.064.672,00	19.169.599.753,00	(895.464.919,00)	95,54
6 01 0 00 0 00 01	Inspektorat Daerah	20.065.064.672,00	19.169.599.753,00	(895.464.919,00)	95,54
	BELANJA OPERASI	19.933.862.072,00	19.040.976.463,00	(892.885.609,00)	95,52
	Belanja Pegawai	10.620.316.903,00	10.023.258.704,00	(597.058.199,00)	94,38
	Belanja Barang dan Jasa	9.313.545.169,00	9.017.717.759,00	(295.827.410,00)	96,82
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	131.202.600,00	128.623.290,00	(2.579.310,00)	98,03
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.523.342.170,00	15.159.855.322,00	(1.363.486.848,00)	91,75
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	16.523.342.170,00	15.159.855.322,00	(1.363.486.848,00)	91,75

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
8 01 0 00 0 00 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.523.342.170,00	15.159.855.322,00	(1.363.486.848,00)	91,75
	BELANJA OPERASI	16.341.511.987,00	15.032.459.116,00	(1.309.052.871,00)	91,99
	Belanja Pegawai	3.877.688.703,00	3.507.268.867,00	(370.419.836,00)	90,45
	Belanja Barang dan Jasa	5.738.478.284,00	4.799.845.249,00	(938.633.035,00)	83,64
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi			-	-
	Belanja Hibah	6.725.345.000,00	6.725.345.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	181.830.183,00	127.396.206,00	(54.433.977,00)	70,06
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	(SURPLUS/DEFISIT)	(99.349.640.221,00)	258.477.014.964,51	357.826.655.185,51	(260,17)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	1.415.663.073.470,00	1.034.272.519.874,22	73,06	1.222.849.908.091,55
Pendapatan Retribusi Daerah	204.165.588.278,00	178.912.998.471,19	87,63	27.136.719.369,17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.250.000.000,00	46.221.160.050,00	74,25	31.749.907.192,00
Lain-lain PAD yang Sah	91.978.614.676,00	40.338.522.130,94	43,86	169.703.623.448,02
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.774.057.276.424,00	1.299.745.200.526,35	73,26	1.451.440.158.100,74
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil	61.652.427.000,00	52.106.429.650,00	84,52	61.216.765.770,00
Dana Alokasi Umum	2.029.253.589.000,00	1.990.566.496.640,00	98,09	1.976.058.968.384,00
Dana Alokasi Khusus	1.014.469.052.000,00	1.004.250.221.957,00	98,99	1.331.571.219.542,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	3.105.375.068.000,00	3.046.923.148.247,00	98,12	3.368.846.953.696,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Fiskal	6.700.771.000,00	6.700.771.000,00	100,00	11.346.961.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	6.700.771.000,00	6.700.771.000,00	100,00	11.346.961.000,00
Total Pendapatan Transfer	3.112.075.839.000,00	3.053.623.919.247,00	98,12	3.380.193.914.696,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	2.406.143.000,00	240,61	2.895.819.700,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00		
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	202.011.347.868,00	203.417.490.868,00	100,70	2.895.819.700,00
JUMLAH PENDAPATAN	5.088.144.463.292,00	4.556.786.610.641,35	89,56	4.834.529.892.496,74

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	2.483.703.181.724,00	1.992.090.954.369,20	80,21	1.657.095.800.087,00
Belanja Barang dan Jasa	1.337.992.772.436,00	1.138.177.002.805,71	85,07	1.187.981.415.203,76
Belanja Bunga	47.206.923.484,00	46.470.147.735,00	98,44	57.260.225.861,00
Belanja Hibah	188.681.115.540,00	186.634.548.226,00	98,92	534.704.400.625,00
Belanja Bantuan Sosial	13.654.484.000,00	10.332.950.000,00	75,67	29.630.396.000,00
Jumlah Belanja Operasi	4.071.238.477.184,00	3.373.705.603.135,91	82,87	3.466.672.237.776,76
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah			-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.365.280.187,00	125.810.216.574,46	85,96	176.436.362.807,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.421.830.907,00	92.833.465.160,47	79,06	216.584.489.838,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.312.151.330,00	96.333.424.383,00	87,33	114.279.541.753,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.563.732.038,00	39.293.080.845,00	147,92	26.659.408.723,00
Belanja Modal Aset Lainnya	214.808.550,00	199.151.000,00	92,71	
Jumlah Belanja Modal	400.877.803.012,00	354.469.337.962,93	88,42	533.959.803.121,55
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	3,11	3.331.110.441,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	23.451.539.191,00	728.941.216,00	3,11	3.331.110.441,00
Jumlah Belanja	4.495.567.819.387,00	3.728.903.882.314,84	82,95	4.003.963.151.339,31
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA			-	
Belanja Bagi Hasil Pajak	653.252.306.860,00	561.775.713.362,00	86,00	724.153.525.994,00
Belanja Bantuan Keuangan	38.673.977.266,00	7.630.000.000,00	19,73	6.306.245.545,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	691.926.284.126,00	569.405.713.362,00	82,29	730.459.771.539,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.187.494.103.513,00	4.298.309.595.676,84	82,86	4.734.422.922.878,31
SURPLUS/(DEFISIT)	(99.349.640.221,00)	258.477.014.964,51	(260,17)	100.106.969.618,43
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	100,00	121.170.302.806,94
Pencairan Dana Cadangan			-	203.511.200.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	1.132.467.037,00
Jumlah Penerimaan	262.829.207.185,00	262.828.328.505,37	100,00	325.813.969.843,94

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-		-	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	97,44	163.091.729.270,00
Jumlah Pengeluaran	163.479.566.964,00	159.291.542.148,00	97,44	163.091.729.270,00
PEMBIAYAAN NETTO	99.349.640.221,00	103.536.786.357,37	104,21	162.722.240.573,94
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	362.013.801.321,88	-	262.829.210.192,37



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.0.00.0.00.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.081.558.000,00	81.558.000,00	108,15	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	1.081.558.000,00	81.558.000,00	108,15	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	950.000.000,00	1.039.958.000,00	89.958.000,00	109,46	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000,00	41.600.000,00	(8.400.000,00)	83,20	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	1.081.558.000,00	81.558.000,00	108,15	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.549.106.034.264,00	2.075.969.968.034,00	473.136.066.230,00	81,43	
0.00.1.01.0.00.0.00.01..01.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.857.080.989.547,00	1.416.694.756.231,00	440.386.233.316,00	76,28	
0.00.1.01.0.00.0.00.01..01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	59.940.400,00	48.730.200,00	11.210.200,00	81,29	
0.00.1.01.0.00.0.00.01..01.1.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	3.225.000,00	2.937.500,00	287.500,00	91,08	
0.00.1.01.0.00.0.00.01..01.1.01.00025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	2.937.500,00	287.500,00	91,08	
0.00.1.01.0.00.0.00.01..01.1.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.113.900,00	3.113.900,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01..01.1.01.00045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.113.900,00	3.113.900,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01..01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.172.500,00	7.172.500,00	-	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	36.045.000,00	36.120.000,00	75.000,00	100,20	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.045.000,00	36.120.000,00	75.000,00	100,20	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	45.000,00	120.000,00	75.000,00	266,66	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.045.000,00	36.120.000,00	75.000,00	100,20	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	16.523.342.170,00	15.159.855.322,00	1.363.486.848,00	91,74	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.953.765.180,00	4.335.084.737,00	618.680.443,00	87,51	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	87.360.600,00	78.111.200,00	9.249.400,00	89,41	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	21.788.000,00	20.626.000,00	1.162.000,00	94,66	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.01.00055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.788.000,00	20.626.000,00	1.162.000,00	94,66	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	56.692.600,00	50.635.200,00	6.057.400,00	89,31	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.01.00065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.692.600,00	50.635.200,00	6.057.400,00	89,31	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.880.000,00	6.850.000,00	2.030.000,00	77,13	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.01.00075.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	6.850.000,00	2.030.000,00	77,13	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.877.688.703,00	3.507.268.867,00	370.419.836,00	90,44	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.877.688.703,00	3.507.268.867,00	370.419.836,00	90,44	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.02.00015.1.01.	Belanja Pegawai	3.877.688.703,00	3.507.268.867,00	370.419.836,00	90,44	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	4.590.000,00	-	4.590.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	3.910.000,00	-	3.910.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.05.00095.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	-	3.910.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	680.000,00	-	680.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.05.00115.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	-	680.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	214.302.734,00	154.701.336,00	59.601.398,00	72,18	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.869.400,00	2.518.100,00	7.351.300,00	25,51	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.00015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.869.400,00	2.518.100,00	7.351.300,00	25,51	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.262.200,00	20.469.950,00	1.792.250,00	91,94	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.00055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.262.200,00	20.469.950,00	1.792.250,00	91,94	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.00065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.0007	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	51.316.700,00	42.175.244,00	9.141.456,00	82,18	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.00075.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.316.700,00	42.175.244,00	9.141.456,00	82,18	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	8.500.000,00	8.060.904,00	439.096,00	94,83	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.00085.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.060.904,00	439.096,00	94,83	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	116.954.434,00	81.477.138,00	35.477.296,00	69,66	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.06.00095.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.954.434,00	81.477.138,00	35.477.296,00	69,66	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	162.456.206,00	107.982.984,00	54.473.222,00	66,46	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	162.456.206,00	107.982.984,00	54.473.222,00	66,46	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.07.00075.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.780,00	-	80.780,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.07.00075.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.375.426,00	107.982.984,00	54.392.442,00	66,50	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	480.102.180,00	379.464.720,00	100.637.460,00	79,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.740.000,00	2.450.000,00	290.000,00	89,41	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08.00015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	2.450.000,00	290.000,00	89,41	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	68.128.000,00	2.128.000,00	66.000.000,00	3,12	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08.00025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.128.000,00	2.128.000,00	66.000.000,00	3,12	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.347.460,00	5.300.000,00	3.047.460,00	63,49	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08.00035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.347.460,00	5.300.000,00	3.047.460,00	63,49	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	400.886.720,00	369.586.720,00	31.300.000,00	92,19	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.08.00045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.886.720,00	369.586.720,00	31.300.000,00	92,19	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	107.264.757,00	87.555.630,00	19.709.127,00	81,62	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.490.000,00	29.945.908,00	10.544.092,00	73,95	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.09.00015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.490.000,00	29.945.908,00	10.544.092,00	73,95	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	47.320.000,00	38.196.500,00	9.123.500,00	80,71	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.09.00065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.320.000,00	38.196.500,00	9.123.500,00	80,71	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	19.454.757,00	19.413.222,00	41.535,00	99,78	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.09.00095.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.454.757,00	19.413.222,00	41.535,00	99,78	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.14	FASILITASI KEPROTOKOLAN	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.14.0001	FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN ACARA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
0.00.8.01.0.00.0.00.01..01.1.14.00015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..02.	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.256.881.390,00	3.037.084.473,00	219.796.917,00	93,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01..02.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.256.881.390,00	3.037.084.473,00	219.796.917,00	93,25	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..02.1.01.0002	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	422.131.200,00	379.734.993,00	42.396.207,00	89,95	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..02.1.01.00025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	422.131.200,00	379.734.993,00	42.396.207,00	89,95	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..02.1.01.0012	PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	2.834.750.190,00	2.657.349.480,00	177.400.710,00	93,74	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..02.1.01.00125.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.834.750.190,00	2.657.349.480,00	177.400.710,00	93,74	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..03.	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.684.483.900,00	6.666.566.970,00	17.916.930,00	99,73	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..03.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	6.684.483.900,00	6.666.566.970,00	17.916.930,00	99,73	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..03.1.01.0004	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	6.684.483.900,00	6.666.566.970,00	17.916.930,00	99,73	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..03.1.01.00045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.138.900,00	191.221.970,00	17.916.930,00	91,43	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..03.1.01.00045.1.05.	Belanja Hibah	6.475.345.000,00	6.475.345.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..04.	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	156.098.000,00	127.039.694,00	29.058.306,00	81,38	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..04.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	156.098.000,00	127.039.694,00	29.058.306,00	81,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01..04.1.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	156.098.000,00	127.039.694,00	29.058.306,00	81,38	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..04.1.01.00035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	156.098.000,00	127.039.694,00	29.058.306,00	81,38	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..05.	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	299.893.000,00	285.040.900,00	14.852.100,00	95,04	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..05.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	299.893.000,00	285.040.900,00	14.852.100,00	95,04	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..05.1.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	299.893.000,00	285.040.900,00	14.852.100,00	95,04	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..05.1.01.00035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.893.000,00	35.040.900,00	14.852.100,00	70,23	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..05.1.01.00035.1.05.	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..06.	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.172.220.700,00	709.038.548,00	463.182.152,00	60,48	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..06.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.172.220.700,00	709.038.548,00	463.182.152,00	60,48	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..06.1.01.0004	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	146.631.500,00	110.941.628,00	35.689.872,00	75,66	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..06.1.01.00045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.631.500,00	110.941.628,00	35.689.872,00	75,66	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..06.1.01.0006	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI	1.025.589.200,00	598.096.920,00	427.492.280,00	58,31	
8.01.8.01.0.00.0.00.01..06.1.01.00065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.589.200,00	598.096.920,00	427.492.280,00	58,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.487.297.170,00)	(15.123.735.322,00)	(1.363.411.848,00)	91,72	
	JUMLAH BELANJA	16.523.342.170,00	15.159.855.322,00	1.363.486.848,00	91,74	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.487.297.170,00)	(15.123.735.322,00)	(1.363.411.848,00)	91,72	



NOMOR

TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Halaman 1 dari 224

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.989.971.699.653,00	2.443.523.063.869,31	348.879.713.251,00	315.445.764.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.357.150.270.987,00	1.893.415.112.534,00	180.591.952.804,00	171.729.002.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.0.0 0.0.00.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.357.150.270.987,00	1.893.415.112.534,00	180.591.952.804,00	171.729.002.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.0.0 0.0.00.01..01.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.856.230.989.547,00	1.416.694.756.231,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.0.0 0.0.00.01..01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.940.400,00	48.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.0.0 0.0.00.01..01. 1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.225.000,00	2.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.0.0 0.0.00.01..01. 1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.113.900,00	3.113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.0.0 0.0.00.01..01. 1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.172.500,00	7.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah		4.071.238.477.184,00	3.373.705.603.135,91	400.877.803.012,00	354.469.337.962,93	23.451.539.191,00	728.941.216,00	691.926.284.126,00	569.405.713.362,00



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	459.220.074,00		391.753.340,00	67.466.734,00
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	22.986.826.578,00		22.986.826.578,00	-
3	Dinas Kesehatan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	584.281.400,00	10.518.004,00	584.281.400,00	10.518.004,00
		Piutang Retribusi Daerah		38.943.396.569,00	21.184.521.337,00	17.758.875.232,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	425.993.031,00		425.993.031,00	-
		Piutang Retribusi Daerah		585.243.785,00	24.207.965,00	561.035.820,00
5	Dinas Sosial	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	44.405.000,00		44.405.000,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Piutang Retribusi Daerah	42.356.000,00	54.392.400,00	24.520.000,00	72.228.400,00
7	Dinas Perhubungan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.650.000,00		13.650.000,00	-
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Piutang Retribusi Daerah	1.050.000,00		1.050.000,00	-
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT	Piutang Retribusi Daerah	-			-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan		733.310.769,83	2.068.108.416,66	955.685.746,00	1.845.733.440,49
		Piutang Retribusi Daerah	646.700.770,83	1.936.498.417,66	869.075.747,00	1.714.123.441,49
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	86.609.999,00	131.609.999,00	86.609.999,00	131.609.999,00
11	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Piutang Retribusi Daerah	37.700.000,00		900.000,00	36.800.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Piutang Retribusi Daerah	459.635.000,00	37.200.000,00	45.500.000,00	451.335.000,00
13	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27.000.000,00		27.000.000,00	-
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		7.784.000,00	7.000.000,00	11.034.000,00	3.750.000,00
		Piutang Retribusi Daerah	4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	-
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.784.000,00		34.000,00	3.750.000,00
15	Sekretariat Daerah Provinsi NTT		25.886.000,00	29.886.000,00	37.886.000,00	17.886.000,00

PL

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
16	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Piutang Retribusi Daerah	8.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	-
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	17.886.000,00	17.886.000,00	17.886.000,00	17.886.000,00
17	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		73.349.248.205,06	53.754.399.174,49	77.812.886.637,98	49.290.760.741,57
		Piutang Pajak Daerah	66.530.745.794,10	40.842.660.743,00	65.404.196.293,00	41.969.210.244,10
		Piutang Retribusi Daerah	1.393.129.000,00	12.911.738.431,49	6.983.316.934,02	7.321.550.497,47
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.425.373.410,96		5.425.373.410,96	-
			269.875.013,00	32.367.407.681,00	-	32.637.282.694,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-			-
		Piutang Transfer		32.367.407.681,00		32.367.407.681,00
		Piutang Lainnya	269.875.013,00			269.875.013,00
	TOTAL		99.468.221.070,89	127.857.552.030,15	124.572.101.034,98	102.753.672.066,06

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



LAMPIRAN IX RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1.	Piutang Pajak Daerah	41.969.210.244,10	(1.126.549.501,10)	40.842.660.743,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	27.915.948.390,96	(12.721.670.220,20)	15.194.278.170,76
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	231.230.737,00	(175.213.733,40)	56.017.003,60
4.	Piutang Transfer	32.367.407.681,00		32.367.407.681,00
5.	Piutang Lainnya	269.875.013,00	(269.875.013,00)	-
	TOTAL	102.753.672.066,06	(14.293.308.467,70)	88.460.363.598,36

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali sampai tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13 = 9-12
I	Investasi Permanen				1.057.275.813.000,00	697.034.363.000,00	-	697.034.363.000,00	360.241.450.000,00	46.221.160.050,00	-	697.034.363.000,00
	1983 s/d 2022	PT. Bank NTT	Perda	Penyertaan Modal pada Bank NTT	766.249.000.000,00	525.007.550.000,00	-	525.007.550.000,00	241.241.450.000,00	38.737.314.988,00	-	525.007.550.000,00
	1987 s/d 2017	PT. Flobamor	Perda	Penyertaan Modal pada PD. Flobamor	19.426.813.000,00	19.426.813.000,00	-	19.426.813.000,00	-	-	-	19.426.813.000,00
	2009 S/D 2017	PT. Askrida	Perda	Saham	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	-	-	1.600.000.000,00
	2012 S/D 2022	PT. Jamkrida	Perda	Saham	175.000.000.000,00	129.000.000.000,00	-	129.000.000.000,00	46.000.000.000,00	7.483.845.062,00	-	129.000.000.000,00
	2021	PT. KI Bolok	Perda	Penyertaan Modal KI Bolok	95.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	22.000.000.000,00	73.000.000.000,00	-	-	22.000.000.000,00
II	Investasi Non Permanen				92.122.185.016,00	92.122.185.016,00	-	92.122.185.016,00	-	-	92.075.310.003,00	46.875.013,00
	2003 s/d 2019	PNS Lingkup Pemprov. NTT	Perda APBD	Kredit Kendaraan Roda 2	48.692.760.000,00	48.692.760.000,00	-	48.692.760.000,00	-	-	48.692.760.000,00	-
	2007 s/d 2021	PNS Lingkup Pemprov. NTT	Perda APBD	Kredit Kendaraan Roda 4	43.429.425.016,00	43.429.425.016,00	-	43.429.425.016,00	-	-	43.382.550.003,00	46.875.013,00
Total					1.149.397.998.016,00	789.156.548.016,00	-	789.156.548.016,00	360.241.450.000,00	46.221.160.050,00	92.075.310.003,00	697.081.238.013,00



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
 E. MELKADES LAKA LENA

LAMPIRAN XII RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.973.266.622.365,51	151.344.842.819,19	194.194.249.785,42	2.930.417.215.399,28
2	Dinas Kesehatan	369.786.825.130,10	37.632.044.348,04	53.832.845.634,75	353.586.023.843,39
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.858.183.345.020,68	104.236.362.514,53	80.985.533.884,23	3.881.434.173.650,98
4	Satuan Polisi Pamong Praja	631.824.923,81	43.911.600,00	251.776.367,62	423.960.156,19
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.800.801.964,29	16.386.930,00	134.580.622,66	3.682.608.271,63
6	Dinas Sosial	47.800.229.651,32	16.796.842.680,90	3.585.523.627,97	61.011.548.704,25
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.656.105.186,15	12.720.346.802,80	6.282.525.885,40	9.093.926.103,55
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	108.445.911.033,20	2.035.167.140,00	5.519.846.350,09	104.961.231.823,11
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	479.531.951,05	966.110.611,55	288.606.950,00	1.157.035.612,60
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.724.855.193,77	455.776.838,00	251.973.487,65	9.928.658.544,12
11	Dinas Perhubungan	152.688.378.943,64	4.532.108.659,29	5.217.410.007,10	152.003.077.595,83
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.688.269.127,85	191.531.861,30	15.821.479,00	5.863.979.510,15
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8.117.426.546,36	5.179.219.986,36	24.736.000,00	13.271.910.532,72
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.785.699.480,88	45.710.000,00	6.090.501.141,64	14.740.908.339,24
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.914.813.805,73	139.561.265,00	439.000.161,40	14.615.374.909,33
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	258.867.641.855,47	34.910.000,00	1.868.388.675,09	257.034.163.180,38
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.513.864.075,08	317.530.501,99	-	15.831.394.577,07
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	269.113.826.244,74	6.343.092.500,00	33.899.875.964,60	241.557.042.780,14
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	37.263.567.091,14	328.658.473,00	1.217.131.208,31	36.375.094.355,83
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	97.140.481.883,93	631.871.585,00	5.979.162.610,37	91.793.190.858,56
21	Dinas Peternakan	65.781.815.055,52	1.044.982.050,00	1.314.571.252,61	65.512.225.852,91
22	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	30.698.608.004,85	96.088.900,00	1.209.640.424,23	29.585.056.480,62

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.804.144.664,11	4.625.690.282,10	4.809.680.799,16	33.620.154.147,05
24	Sekretariat Daerah	399.595.341.562,60	3.413.506.769,86	7.051.106.195,07	395.957.742.137,39
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	62.425.663.511,09	852.911.840,00	4.859.730.653,88	58.418.844.697,21
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.615.759.596,50	100.242.355,00	4.230.000,00	1.711.771.951,50
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	867.418.885.565,30	14.640.551.596,65	8.465.686.404,86	873.593.750.757,09
28	Badan Keuangan Daerah	569.514.917,25	369.633.913,75	6.660.000,00	932.488.831,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	442.526.778,20	90.885.505,00	295.635.424,60	237.776.858,60
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	30.205.083.490,74	333.388.302,00	1.458.464.268,83	29.080.007.523,91
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	175.490.526,76	-	22.707.040,16	152.783.486,60
32	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	15.239.955.621,85	241.557.040,00	1.546.480.393,18	13.935.032.268,67
33	Inspektorat Daerah	11.999.861.661,73	128.623.290,00	807.596.372,06	11.320.888.579,67
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.215.535.445,70	42.918.909,53		14.258.454.355,23
TOTAL		9.789.058.207.876,90	369.972.967.870,84	431.931.679.071,94	9.727.099.496.675,80

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



LAMPIRAN XIII RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Tanah	2.767.006.705.333,51	13.700.200.000,00	26.180.816.000,00	2.754.526.089.333,51
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.169.023.298.506,37	166.692.341.916,72	96.819.235.837,99	2.238.896.404.585,10
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.469.315.810.754,68	237.385.440.147,72	36.019.459.496,17	3.670.681.791.406,23
4	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.048.196.309.841,20	101.904.458.296,41	7.117.937.930,33	7.142.982.830.207,28
5	Aset Tetap Lainnya	270.358.725.959,83	41.110.453.545,00	95.470.021.921,79	215.999.157.583,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	144.240.219.937,84	24.564.497.209,35	17.071.172.016,49	151.733.545.130,70
7	Akumulasi Penyusutan	(6.079.082.862.456,53)	(665.802.678.140,58)	(297.165.219.027,05)	(6.447.720.321.570,06)
Jumlah		9.789.058.207.876,90	(80.445.287.025,38)	(18.486.575.824,28)	9.727.099.496.675,80

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/P ENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.854.434.790,86		6.816.851.940,65				3.822.686.160,00			13.928.141,60	9.834.672.429,91
2	Dinas Kesehatan	3.717.661.253,00		1.792.021.594,29		139.958.000,00					17.597.504,55	5.632.043.342,74
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	99.990.796.366,78			3.580.607.317,41				957.131.452,71		3.375.842.085,63	99.238.430.145,85
4	Badan Penanggulangan Bencana	97.800.000,00										97.800.000,00
5	Dinas Sosial	2.560.477.790,00		174.771.715,00				2.560.477.790,00				174.771.715,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	285.738.350,00		6.150.122.323,00								6.435.860.673,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.470.287.492,00					1.297.208.000,00	612.405.142,00				1.560.674.350,00
8	Dinas Perhubungan	116.706.250,00		959.335.057,00								1.076.041.307,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	837.650.000,00										837.650.000,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.411.235.000,00										2.411.235.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.570.000,00										301.570.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.094.000,00										28.094.000,00
13	Dinas Peternakan	-										-
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	865.597.060,00										865.597.060,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.413.895.740,00						4.413.895.740,00				-
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.589.000.000,00										1.589.000.000,00
17	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.234.753.945,20		4.950.829.262,00								6.185.583.207,20

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/P ENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.464.521.900,00										15.464.521.900,00
JUMLAH		144.240.219.937,84	-	20.843.931.891,94	3.580.607.317,41	139.958.000,00	1.297.208.000,00	11.409.464.832,00	957.131.452,71	-	3.407.367.731,78	151.733.545.130,70

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,



LAMPIRAN XV RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.511.189.984,85	555.096.267,03	49.827.000,00	6.016.459.251,88
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	430.851.139,00		430.851.139,00	-
3	Dinas Kesehatan	1.507.843.145,20	562.947.457,35	13.015.000,00	2.057.775.602,55
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9.136.597.310,51	6.002.928.629,51	238.131.493,00	14.901.394.447,02
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	2.384.800,00		2.384.800,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.641.775,00	54.612.500,00	2.810.000,00	78.444.275,00
7	Dinas Sosial	17.455.000,80	1.553.147,94		19.008.148,74
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.560.000,00	324.000,00	1.560.000,00	324.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.260.000,00		1.260.000,00	-
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	894.498.846,32	17.373.335,00	12.230.000,00	899.642.181,32
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	545.579.340,00	7.777.000,00	12.115.000,00	541.241.340,00
12	Dinas Perhubungan	1.632.317.850,00	138.842.513,10	6.300.000,00	1.764.860.363,10
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	95.874.694,00		24.672.208,00	71.202.486,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.632.100,00	2.247.000,00	7.482.100,00	3.397.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	618.044.600,00	3.892.000,00	431.585.000,00	190.351.600,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	112.309.841,85	800.000,00	3.150.600,00	109.959.241,85
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	48.566.718,63	5.732.000,00	44.330.000,00	9.968.718,63
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	810.268.800,00	20.840.847,00		831.109.647,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.149.762.526,46	1.331.270,00	118.636.400,00	3.032.457.396,46
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.711.543.200,00	825.000,00	1.440.000,00	3.710.928.200,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.116.151.467,36	10.385.000,00	9.945.600,00	8.116.590.867,36
22	Dinas Peternakan	195.661.923,00	400.000,00	4.668.000,00	191.393.923,00
23	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	24.054.093.024,07	7.278.000,00	5.059.000,00	24.056.312.024,07

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.330.269.000,00	197.976.770,96	2.305.000,00	1.525.940.770,96
25	Sekretariat Daerah	3.628.897.536,89	134.924.432,00	907.540.247,46	2.856.281.721,43
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	256.870.915,00	695.427.152,00	256.870.915,00	695.427.152,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	39.724.375,00	56.130.578,00	39.724.375,00	56.130.578,00
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	310.927.873.186,93	559.284.501,92	220.499.430,00	311.266.658.258,85
29	Badan Keuangan Daerah	1.289.252.943,00	24.543.000,00	334.363.975,00	979.431.968,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	22.254.449,60	6.054.478,00	5.716.000,00	22.592.927,60
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	131.920.000,00	7.561.018,00		139.481.018,00
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	12.810.000,00	4.566.000,00	12.810.000,00	4.566.000,00
33	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	21.675.000,00	72.551.483,00	16.960.000,00	77.266.483,00
34	Inspektorat Daerah	8.070.000,01	3.020.000,00	6.710.000,00	4.380.000,01
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.734.000,00	3.287.800,00	7.240.000,00	3.781.800,00
Jumlah		378.304.054.693,48	9.162.897.980,81	3.229.808.482,46	384.237.144.191,83

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



LAMPIRAN XVI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								
Jumlah			-	-	-	-	-	-



LAMPIRAN XVII RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	436.070.688,00	3.310.366.717,71	510.351.487,63	3.236.085.918,08
2	Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	45.397.745.235,00	35.184.056.880,00	45.397.745.235,00	35.184.056.880,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	159.291.542.148,00	159.291.542.148,00	159.291.542.148,00	159.291.542.148,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	5.161.956.414,87	3.212.826.838,42	5.161.956.414,87	3.212.826.838,42
5	Utang Belanja	108.011.051.108,60	42.451.808.456,20	101.195.519.183,31	49.267.340.381,49
	- Utang Belanja Pegawai	3.161.311.183,00	2.082.724.417,00	3.161.311.183,00	2.082.724.417,00
	- Utang Belanja Barang dan Jasa	24.135.411.473,63	24.697.352.845,14	24.135.411.473,63	24.697.352.845,14
	- Utang Belanja Hibah	6.563.114,00	6.003.134,04	6.563.114,00	6.003.134,04
	- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.976.800,00	118.232.495,00	42.976.800,00	118.232.495,00
	- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	972.580.307,53	474.935.826,65	972.580.307,53	474.935.826,65
	- Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	464.628.650,00	2.027.855.612,37	47.844.652,71	2.444.639.609,66
	- Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	69.409.985,44		69.409.985,44	-
	- Utang Belanja Bagi Hasil	79.158.169.595,00	13.044.704.126,00	72.759.421.667,00	19.443.452.054,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	8.092.124.000,00	-	8.092.124.000,00
	- Hutang Taspen	-			-
	- Hutang Kelebihan Pembayaran Transfer	-	8.092.124.000,00		8.092.124.000,00
	- Hutang Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-			-
	Jumlah	318.298.365.594,47	251.542.725.040,33	311.557.114.468,81	258.283.976.165,99



LAMPIRAN XVIII RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Kepada LKBB-BUMN- Jangka Menengah-PT. SMI	633.714.785.632,00	474.423.243.484,00	633.714.785.632,00	474.423.243.484,00
	Jumlah	633.714.785.632,00	474.423.243.484,00	633.714.785.632,00	474.423.243.484,00



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah				Jumlah yang masih harus dianggarkan kembali pada APBD Tahun berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Tambah/Kurang	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								
JUMLAH			-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No.	BU/MD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
I	Bidang Perbankan																	
	PT. Bank NTT	2	S	1.701.298.558.937,00	18.097.841.652.369	293.744.300.397	20.092.884.511.703	17.281.610.402.301		17.281.610.402.301	2.209.536.800.000	33.818.538.586	38.737.314.988	(12.363.517.520)	580.282.288.336	2.811.274.109.402	23,76	667.958.728.394
II	Bidang Perdagangan																	
	PT. Floharanor	2	S	4.582.041.605	9.245.720.224	961.552.039	14.789.313.868	23.064.203.813	8.979.516.013	32.043.719.826	25.036.265.942				(42.290.671.900)	(17.254.405.958)	99,90	
III	Bidang Penjamin Kredit																	
	PT. Jankrida	2	S	160.579.020.016	125.339.211.660		285.918.231.676	41.924.976.379	82.791.898.315	124.716.874.694	129.100.000.000		7.483.845.062	20.739.000.982	11.362.356.000	161.201.356.982	99,92	161.072.395.896
IV	Bidang Kawasan Perindustrian																	
	KI Bolok	2	S	7.252.800.502	5.133.340.468		12.386.140.970	539.316.542		539.316.542	22.000.000.000			80.680.002	(10.233.855.574)	11.846.824.428	100,00	11.846.824.428
Total Seluruh Bidang				1.873.712.421.060	18.237.559.924.721	294.705.852.436	20.405.978.198.217	17.347.138.899.035	91.771.414.328	17.438.910.313.363	2.385.673.065.942	33.818.538.586	46.221.160.050	8.456.163.464	539.120.116.862	2.967.067.884.854	-	840.877.948.718



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 IKHITISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Lab a (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Lab a (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Bidang Perbankan								
	PT. Bank NTT	2	S	1.225.308.464.779,00	1.041.700.202.750,00	183.608.262.029,00	9.877.071.730,00	21.654.594.846,00	171.830.738.913,00
II	Bidang Perdagangan								
	PT. Flobamor	2	S	2.927.959.145,00	14.525.426.963,00	(11.597.467.818,00)	585.673.773,00	-	(11.011.794.045,00)
III	Bidang Penjamin Kredit								
	PT. Jamkrida	2	S	69.980.867.236,00	53.323.451.935,00	16.657.415.301,00	364.370.104,00	2.914.193.396,00	14.107.592.009,00
IV	Bidang Kawasan Perindustrian								
	KI Bolok	2	S	1.028.559.013,00	2.722.451.528,00	(1.693.892.515,00)	35.414.511,00	392.900,00	(1.658.870.904,00)
Total Seluruh Bidang				1.299.245.850.173,00	1.112.271.533.176,00	186.974.316.997,00	10.862.530.118,00	24.569.181.142,00	173.267.665.973,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 E. MELKIADES LAKA LINA